

TESIS

**KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI
PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
KABUPATEN TANA TORAJA**

*The Commitment Of The Leadership As A Moderation
Of The Influence Of Regional Owned Goods
Administration On The Quality Of Financial
Statements Of Tana Toraja District*

**Romy Pradani Muslim
A042191014**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN TANA TORAJA

The Commitment Of The Leadership As A Moderation Of The Influence Of Regional Owned Goods Administration On The Quality Of Financial Statements Of Tana Toraja District

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar magister

Disusun dan diajukan oleh

Romy Pradani Muslim
A042191014



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

Romy Pradani Muslim
A042191014

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Juli 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pedamping,


Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196406091992031003

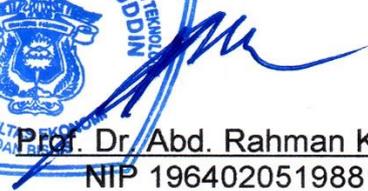

Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si
NIP 197602082003122001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,


Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP 197106192000031001




Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP 196402051988101001

Tesis

KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN TANA TORAJA

disusun dan diajukan oleh

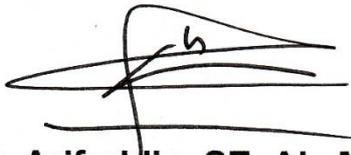
Romy Pradani Muslim
A042191014

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, Juli 2021

Komisi Penasehat

Ketua



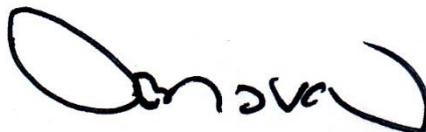
Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA
NIP 196406091992031003

Anggota



Dr. Wahda, SE., M.Pd., M.Si
NIP 197602082003122001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP 197106192000031001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini ,

Nama : Romy Pradani Muslim
NIM : A042191014
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa usulan penelitian tesis yang berjudul

KOMITMEN PIMPINAN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KABUPATEN TANA TORAJA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata dalam naskah usulan penelitian tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUNo. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Romy Pradani Muslim
A042191014

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan hidayah-Nya maka tesis ini dapat terselesaikan. Tesis ini merupakan tugas akhir yang disusun untuk memenuhi syarat mencapai gelar derajat Strata Dua (S-2) pada Pasca Sarjana Keuangan Daerah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Peneliti mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda, saudara-saudari terkasih, istri dan 2 putra putri tersayang peneliti yang telah memberikan doa dan motivasi selama proses awal kuliah sampai akhir.

Pada kesempatan ini pula peneliti ucapkan terima kasih kepada bapak Tim komisi penasehat Prof. Dr. Arifuddin, SE.,Ak.,M.Si.,CA dan ibu Dr. Wahda, SE.,M.Pd.,M.Si atas bimbingannya kepada peneliti. Disamping itu juga ucapan terima kasih dihaturkan peneliti kepada tim penguji diantaranya ibu Prof. Dr. Nursini, SE.,MA, ibu Dr. Sri Sundari, SE.,Ak.,M.Si.,CA, bapak Dr. Muhammad Sobarsyah, SE.,M.Si dan bapak Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, sebagai Ketua Program Studi MKD yang telah memberikan saran-saran untuk menyempurnakan tesis ini.

Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan dukungan selama penelitian, dukungan teman-teman MKD angkatan 20191 kelas makassar, semua individu yang atas izin Allah telah terlibat melancarkan urusan penyelesaian tesis ini. semoga Allah membalas budi baik kalian semua Aamiin Allahuma Aamiin. Akhir kata, tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat dibutuhkan untuk menyempurnakan.

Makassar, Agustus 2021

Penulis

ABSTRAK

Komitmen Pimpinan Sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten Tana Toraja. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah satuan kerja di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja dengan responden dari masing-masing satuan kerja yang terlibat dalam proses pengelolaan aset daerah. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data dalam penelitian yaitu penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research). Alat bantu pengujian yang digunakan adalah Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Dan akan diuji dengan teknik metode analisis pendekatan regresi berganda linear dengan bantuan moderasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja. Komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara penerapan pembukuan dengan kualitas laporan keuangan. Komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara inventarisasi dengan kualitas laporan keuangan. Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan pelaporan dengan kualitas laporan keuangan.

Kata Kunci : Laporan Keuangan, Penatausahaan, Komitmen Pimpinan

ABSTRACT

The Commitment Of The Leadership As A Moderation Of The Influence Of Regional Owned Goods Administration On The Quality Of Financial Statements Of Tana Toraja District

The purpose of this study is to analyze the impact of regional asset management on the quality of financial reports in Tana Toraja regency. In this study, the researcher uses a quantitative descriptive method. The sample in this study is a work unit within the local government of Tana Toraja Regency with respondents from each work unit involved in the process of managing regional assets. The data used in this study is primary data. Data collection in the research is done through field research and library research. The testing tool used is Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) and will be tested using linear multiple regression approach analysis method with moderation help. The results of this study suggest that partial accounting, inventory and reporting affect the quality of financial statements of Tana Toraja Regency Government. Leadership commitment can moderate the relationship between accounting application and financial statement quality. The Leadership commitment can influence the relationship between inventory and the quality of financial reports. The relationship between the implementation of reporting and the quality of financial reports cannot be influenced by the leadership commitment.

Keywords: *Financial Report, Administration, Leadership Commitment*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEJUTUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Kegunaan Penelitian	8
1.4.1. Kegunaan Teoritis	8
1.4.2. Kegunaan Praktis	9
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	9
1.6. Definisi dan Istilah	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1. Tinjauan Teori dan Konsep	12
2.1.1. Teori Stewardship	12
2.1.2. Tinjauan Konsep	13
2.2. Tinjauan Empiris	25
2.2.1. Penelitian Terdahulu	25
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	31
3.1. Kernagka Konseptual	31
3.2. Hipotesis.....	33

3.2.1. Pengaruh Pembukuan Terhadap Laporan Keuangan	33
3.2.2. Pengaruh Inventarisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	34
3.2.3. Pengaruh Pelaporan Terhadap kualitas Lapiran	35
3.2.4. Pengaruh Komitmen Pimpinan sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan BMD yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan	36
BAB IV METODE PENELITIAN	37
4.1. Rancangan Penelitian	37
4.2. Situs dan Waktu Penelitian	37
4.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	37
4.4. Jenis dan Sumber Data	38
4.5. Metode Pengumpulan Data	38
4.6. Variabel Penelitian dan Derfinisi Operasional	39
4.6.1. Variabel Independen	39
4.6.2. Variabel Moderating	40
4.6.3. Variabel Dependen	40
4.7. Instrumen Penelitian	43
4.8. Teknik Analisa Data	44
4.8.1. Model Pengukuran atau Outer Model	44
4.8.2. Uji Normalitas	45
4.8.3. Uji Asumsi Klasik	45
4.8.4. Moderated Regression Alalysis (MRA)	47
4.8.5. Uji Hipotesis	49
4.8.6. Uji Koefisien Determinasi	50
BAB V HASIL PENELITIAN	51
5.1. Gambaran Unit Analisis	51
5.2. Analisis Deskriptif Data Responden	51
5.2.1. Karakteristik Rsponden Berdasarkan Jenis OPD	52
5.3. Deskriptif Data Penelitian	53
5.3.1. Analisis Deskriptif Pembukuan	54

5.3.2. Analisis Deskriptif Inventarisasi	55
5.3.3. Analisis Deskriptif Pelaporan	56
5.3.4. Analisis Deskriptif Komitmen Pemimpin	57
BAB VI ANALISA PENELITIAN DAN PENGUJIAN HIPOTESIS	60
6.1. Uji Validasi dan Reabilitasi	60
6.1.1. Uji Validasi	60
6.1.2. Uji Reabilitasi	61
6.2. Uji Asumsi Klasik	62
6.2.1. Uji Normalitas Data	62
6.2.2. Uji Multikolinearitas	63
6.2.3. Uji Heterokedastisitas	63
6.3. Analisis Statistik	66
6.3.1. Analisis Regresi Berghanda	66
6.3.2. Analisis Moderated Analysis (MRA)	67
6.4. Pembahasan	72
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN	78
7.1. Kesimpulan	78
7.2. Implikasi Penelitian	78
7.3. Keterbatasan Penelitian	79
7.4. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Predikat opini Laporan Keuangan yang diperoleh Kabupaten Tana Toraja tahun 2013-2019.....	2
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel 5.1 Responden Berdasarkan OPD.....	52
Tabel 5.2 Kriteria Rata-rata Skor Tanggapan Responden.....	54
Tabel 5.3 Tanggapan Responden Mengenai Pembukuan	55
Tabel 5.4 Tanggapan Responden Mengenai Inventarisasi	56
Tabel 5.5 Tanggapan Responden Mengenai Pelaporan	57
Tabel 5.6 Tanggapan Responden Mengenai Komitmen pimpinan.....	58
Tabel 5.7 Tanggapan Responden Mengenai Kualitas Laporan Keuangan	59
Tabel 6.1 Uji Validitas	60
Tabel 6.2 Uji Reliabilitas	61
Tabel 6.3 Uji Normalitas Persamaan Regresi ke 1, 2, 3, dan 4.....	62
Tabel 6.4 Uji Multikolinearitas Data Persamaan Regresi.....	63
Tabel 6.5 Analisis Regresi Berganda X1,X2,X3 terhadap Y.....	66
Tabel 6.6 Uji MRA Terhadap Variabel Pembukuan (X1)	67
Tabel 6.7 Uji MRA Terhadap Variabel Inventarisasi (X2)	69
Tabel 6.8 Uji MRA Terhadap Variabel Pelaporan (X3)	70
Tabel 6.9 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kodefikasi Barang Inventaris	20
Gambar 5.1 Garis Kontinum	54
Gambar 5.2 Garis Kontinum Pembukuan	55
Gambar 5.3 Garis Kontinum Variabel Inventarisasi	56
Gambar 5.4 Garis Kontinum Variabel Pelaporan	57
Gambar 5.5 Garis Kontinum Variabel Komitmen Pimpinan	58
Gambar 5.6 Kontinum Variabel Kualitas Laporan Keuangan	59
Gambar 6.1 Scatterplot Persamaan Regresi	64
Gambar 6.2 Scatterplot MRA Variabel Pembukuan (X1).....	64
Gambar 6.3 Scatterplot MRA Variabel Inventarisasi (X2).....	65
Gambar 6.4 Scatterplot MRA Variabel Pelaporan (X3).....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 menetapkan bahwa wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah adalah penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Laporan keuangan pemerintah daerah yang disajikan menunjukkan akuntabilitas pemerintah atas pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan oleh rakyat haruslah memenuhi kualitas yang diinginkan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Relevan antara lain: memiliki umpan balik, memiliki manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap. Andal antara lain penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Dapat dibandingkan yaitu laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Dapat dipahami yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Fenomena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah yang memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) akan berpengaruh pada kredibilitas pemerintahan tersebut. Jadi tidak heran, jika setiap pemerintah daerah berlomba-lomba untuk

memperoleh predikat tersebut, tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Tabel 1.1. Predikat opini Laporan Keuangan yang diperoleh Kabupaten Tana Toraja tahun 2013-2019

Tahun	Opini Laporan Keuangan
2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2015	Tidak Wajar
2016	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2017	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2018	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
2019	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Berdasarkan tabel 1.1, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja selama 4 tahun berturut-turut masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Tana Toraja tahun anggaran 2019, BPK menemukan 8 temuan terkait dengan sistem pengendalian internal yaitu :

1. Penatausahaan dan pengamanan aset tetap serta aset lain-lain belum tertib
2. Pengelolaan kas pada bendahara pengeluaran belum sepenuhnya tertib
3. Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp95.260.000,00 tidak disetor ke kas daerah tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi
4. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh RSUD Lakipadada dalam menyusun laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan akuntansi pemerintah Kabupaten Tana Toraja
5. Penganggaran kegiatan belanja barang dan pengadaan aset tetap sebesar Rp 8.717.505.727,00 tidak tepat

6. Realisasi pendapatan asli daerah tidak mencapai target sehingga terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum dibayar sejumlah Rp 43.141.816.975,00
7. Pelaksanaan belanja hibah tidak tertib dan
8. Laporan realisasi pelaksanaan APB (Anggaran Pendapatan Belanja) desa terlambat disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.

BPK juga mengungkapkan temuan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan undang-undang yaitu

1. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga tidak seluruhnya disetor ke kas daerah tetapi digunakan secara langsung sebesar Rp 228.919.911,00
2. Perjanjian kerjasama pengelolaan program asuransi tidak sesuai dengan ketentuan
3. Perhitungan dan pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2019 pada Badan Pendapatan Daerah tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp229.711.857,00
4. Denda keterlambatan atas tujuh paket pekerjaan pada dua OPD sebesar minimal Rp1.242.817.255,10 belum dipungut
5. Kekurangan volume pekerjaan pada tiga OPD sebesar Rp 665.775.341,79.

Beberapa temuan Badan Pemeriksaan Keuangan juga khususnya terkait dengan pengelolaan barang milik daerah, baik yang ditemukan melalui pengujian aspek pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari audit Laporan Keuangan secara menyeluruh, maupun temuan yang diperoleh melalui audit khusus pengelolaan barang milik daerah. Beberapa diantara temuan tersebut terkait dengan penatausahaan aset tetap diantaranya masih banyaknya masalah

inventarisasi terhadap barang milik daerah secara keseluruhan dan permasalahan status kepemilikan aset.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan untuk menemukan bukti empiris hubungan antara penatausahaan BMD dengan kualitas laporan keuangan yang ditandai dengan perolehan opini WDP. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan jawaban apakah tren perolehan opini WDP oleh Pemda disebabkan oleh karena masih banyaknya temuan-temuan terkait lemahnya penatausahaan BMD khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahmi (2017), hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan dan pencatatan barang milik daerah kedalam kartu inventaris barang secara langsung akan memudahkan untuk melakukan pelaporan secara tepat waktu yang kemudian akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Sementara penelitian yang dilakukan Febrianti (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai positif ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan pembukuan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah akan memberikan kemudahan akses bagi para pengguna/kuasa pengguna barang yang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna

(DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), kemudahan akses ini secara langsung akan membantu meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmadi (2013), hasil penelitian menunjukkan penatausahaan aset tetap yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan memiliki pengaruh positif dan kontribusi sebesar 50,7% terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Andiani dkk (2017) menemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan namun inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Amaliah dkk (2019) juga menemukan bahwa penatausahaan barang milik negara tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Karena adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut, diduga terdapat faktor lain yang dapat menjelaskan kesenjangan yang terjadi yang akan memengaruhi pengaruh variabel penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel yang dimaksud adalah komitmen pimpinan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pengaruh variabel penatausahaan BMD juga dipengaruhi pula oleh komitmen organisasi termasuk komitmen pimpinan.

Simamora dan Halim (2012) menemukan fakta bahwa faktor komitmen pimpinan yang lebih krusial mempengaruhi pengelolaan aset. Hal ini ditandai dengan informasi-informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa pimpinan yang tidak memperhatikan masalah aset membuat pengelolaan aset ini menjadi persoalan rumit. Dihubungkan dengan aset-aset pemekaran, pimpinan khususnya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus serius dan memiliki komitmen menyelesaikan bukti kepemilikan aset. Hasil penelitian Yusnita (2017) juga menunjukkan bahwa Komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan.

Dua penelitian di atas menunjukkan adanya hubungan antara komitmen pimpinan dengan penerapan suatu kebijakan atau standar. Penelitian ini fokus kepada faktor komitmen pimpinan mengingat untuk mengubah paradigma dan sikap mental serta pengorganisasian suatu kebijakan agar dapat diterapkan dibutuhkan komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan merupakan kemauan atau tekad yang kuat dari pimpinan untuk bekerja mencapai tujuan yang ditentukan. Segala hal akan dilakukan oleh pimpinan agar tujuan dapat tercapai. Dalam hal ini agar penatausahaan BMD bisa diterapkan guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka segala hal yang mendukung kesuksesan upaya tersebut akan dilakukan oleh pimpinan. Komitmen dapat dikatakan sebagai ujung tombak penerapan penatausahaan BMD pada Pemerintah karena inti dari penerapan suatu peraturan atau kebijakan adalah komitmen, baik dari pimpinan maupun dari individu atau masing-masing pekerja di dalamnya. Jika pihak pimpinan mempunyai komitmen yang kuat maka ada banyak cara yang dilakukan agar dapat diterapkan sesuai dengan kebijakan. Bentuk nyata dari keterlibatan pimpinan adalah dengan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk menjamin keberlangsungan organisasi, adanya kebijakan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan serta dikomunikasikan kepada setiap pegawai, dan melaksanakan pelatihan. Dengan demikian pimpinan akan memberikan dorongan motivasi kepada pegawainya untuk melaksanakan program dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas

pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Dengan demikian dapat kita katakan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan bukti bahwa suatu standar diterapkan yang merupakan wujud tanggungjawab pimpinan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut untuk mengetahui keterkaitan penatausahaan aset tetap yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan dengan komitmen pimpinan sebagai variabel moderasi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Komitmen Pimpinan sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Tana Toraja”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah pembukuan BMD berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah inventarisasi BMD berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?
3. Apakah pelaporan BMD berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?
4. Apakah komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pembukuan BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?
5. Apakah komitmen pimpinan memoderasi pengaruh inventarisasi BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?

6. Apakah komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pelaporan BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh pembukuan BMD secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja
2. Menganalisis pengaruh inventarisasi BMD secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja
3. Menganalisis pengaruh pelaporan BMD secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja
4. Menganalisis peran komitmen pimpinan dalam memoderasi pengaruh pembukuan BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja
5. Menganalisis peran komitmen pimpinan dalam memoderasi pengaruh inventarisasi BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja
6. Menganalisis peran komitmen pimpinan dalam memoderasi pengaruh pelaporan BMD terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis yaitu mendapatkan informasi dan menambah pengetahuan mengenai penatausahaan aset tetap dan transparansi laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset tetap yang dibuat oleh Pemerintah Tana Toraja.

2. Bagi pemerintah Pemerintah Tana Toraja yaitu sebagai informasi dalam hal penatausahaan aset tetap, komitmen pimpinan dan penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan informasi keuangan daerah.
3. Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penatausahaan aset tetap, komitmen pimpinan dan kualitas laporan keuangan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu informasi untuk menerapkan penatausahaan aset agar tujuan meningkatkan kualitas laporan keuangan tercapai.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya melakukan penelitian mengenai penatausahaan Barang Milik Daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan serta komitmen pimpinan.

1.6. Definisi dan Istilah

Kabupaten Tana Toraja adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota kabupaten ini adalah Makale.

Aset (Aset) adalah barang, yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi, badan usaha ataupun individu perorangan.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri atas tujuh bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

Bab I yakni Pendahuluan. Bab ini berusaha memberikan gambaran secara singkat mengenai keseluruhan isi tesis ini sekaligus memberikan rambu-rambu untuk masuk pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah dan rumusan masalah. Selanjutnya dalam tujuan penelitian terpapar sesuatu yang akan dituju dan dicapai oleh penelitian ini serta kegunaan yang akan diambil darinya. Berikutnya adalah ruang lingkup yang memberikan Batasan penelitian yang menjadi fokus utama. Serta definisi dan istilah memberikan gambaran awal definisi objek dan subjek penelitian

Bab II berisi Tinjauan Pustaka. Bab ini menguraikan penjelasan tentang teori-teori dan konsep yang menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan dalam tesis ini. Serta pembahasan mengenai Penelitian terdahulu yang akan memudahkan dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori dan konsep.

Bab III berisi kerangka konseptual yang menghubungkan antara variabel independen, dependen, dan variabel moderasi. Selain itu juga membahas mengenai hipotesis yang menjadi jawaban awal dalam penelitian yang perlu dibuktikan lebih lanjut.

Bab IV dalam tesis ini berisi rancangan penelitian yang digunakan, tempat penelitian, dan cara untuk mengumpulkan data penelitian, melakukan analisis dan tehnik analisis data yang digunakan.

Bab V membahas hasil penelitian mulai dari deskripsi data dan deskripsi hasil penelitian setelah menggunakan tehnik dan metode penelitian.

Bab VI membahas mengenai analisis hasil penelitian dan pengujian hipotesis baik pengaruh langsung maupun melalui efek moderasi.

Bab VII membahas mengenai kesimpulan hasil penelitian, implikasi penelitian baik teoritis maupun praktis yang dapat berguna dalam penerapannya. Selain itu juga membahas keterbatasan penelitian yang dialami peneliti dan saran yang dapat menjadi masukan baik bagi Pemerintah Daerah maupun peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1. Teori Stewardship

Teori Stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Menurut Donaldson dan Davis (1997) teori Stewardship didefinisikan sebagai suatu situasi dimana manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi tapi lebih mementingkan prinsipal. Teori ini berasumsi bahwa manajemen sebagai pihak yang berintegritas tinggi, memiliki kejujuran dan mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab melaksanakan tindakan sebaik-baiknya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dalam teori ini manajer akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Berdasarkan asumsi teori stewardship yang menyatakan bahwa manajer akan berusaha mengelola sumber daya secara maksimal dan mengambil keputusan yang terbaik bagi kepentingan organisasi dan bekerja berdasarkan pemikiran bahwa keuntungan (pemenuhan kebutuhan) manajer atau steward dan pemilik atau prinsipal berasal dari perusahaan yang kuat secara organisasi dan secara ekonomi.

Dikaitkan dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah hubungannya dengan teori stewardship yaitu upaya Pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi lebih berkualitas. Pemerintah yang bertindak sebagai manajer mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para

pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan kepala daerah dipilih oleh rakyat. Pemerintah daerah selaku manager wajib memberikan laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam APBD kepada rakyat dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK. Berdasarkan teori stewardship ini, kinerja kepala daerah akan dinilai dalam laporan pertanggungjawabannya kepada DPRD tentang keberhasilan program dan kebijakannya yang tercermin pada realisasi APBD serta opini LKPD yang diperoleh pemerintah daerah.

2.1.2. Tinjauan Konsep

2.1.2.1. Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Menurut Jonas dan Blanchett (2000) kualitas laporan keuangan adalah informasi yang lengkap dan transparan, dirancang tidak menyesatkan kepada pengguna. Agar laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya maka harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Keempat

karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

- a. Relevan;
- b. Andal;
- c. Dapat dibandingkan;
- d. Dapat dipahami.

Fungsi laporan keuangan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan:

1. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

2. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

3. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

4. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

2. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

3. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.1.2.2. Penatausahaan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada penatausahaan aset tetap dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Peranan penatausahaan aset dalam pengelolaan aset menempati posisi yang sangat strategis karena semua kebijakan

lebih efektif jika didasarkan pada data akurat yang diperoleh dari kegiatan penatausahaan aset.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan tentang keterangan-keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerja dalam hal ini aset tetap milik pemerintah daerah.

2.1.2.3. Pembukuan

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah”. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan harus sesuai dengan format:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah,
2. Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin,
3. Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan,
4. Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi, dan Jaringan,
5. Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya,
6. Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi dalam Pengerjaan,
7. Kartu Inventaris Ruang (KIR)

Sementara itu Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan pencatatan semua aset tetap, mutasi, hasil inventarisasi ke dalam daftar barang dan kartu inventaris barang, melakukan penghapusan atas aset tetap yang rusak berat dan hilang, serta melakukan reklasifikasi untuk setiap aset tetap hilang yang ditemukan kembali.

2.1.2.4. Inventarisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “inventarisasi berasal dari kata inventaris, merupakan daftar yang memuat semua barang yang dimiliki oleh individu maupun instansi”. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah”. Inventarisasi aset terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan yuridis/legal. Menurut Sugiama (2013:173), “inventarisasi aset adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan aset, dan mendokumentasikannya, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu”.

Berdasarkan pengertian beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa inventarisasi adalah proses yang dimulai dengan pengumpulan data, pencatatan, dan pelaporan seluruh aset atau barang beserta seluruh aspek legalnya.

Inventarisasi aset dilakukan untuk mendapatkan data seluruh aset yang dimiliki, dikuasai sebuah organisasi, perusahaan, atau instansi pemerintah. Kegiatan identifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai kekayaan daerah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah. Untuk dapat melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara objektif dan dapat diandalkan, pemerintah daerah

perlu memanfaatkan profesi auditor atau jasa penilai yang independen. Dalam kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data yang meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan.

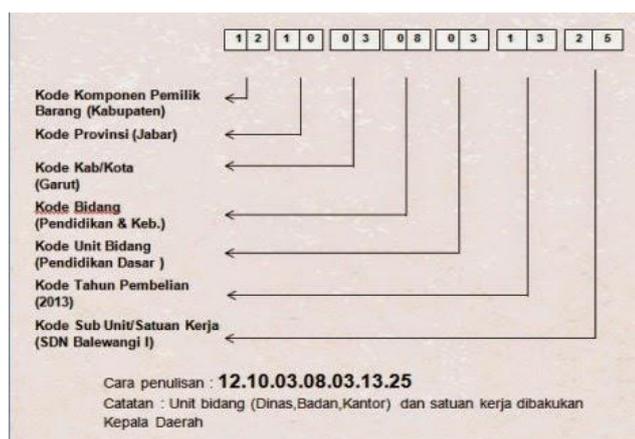
Adanya buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting dalam rangka:

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan dan pengawasan setiap barang;
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing;
3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam Buku Inventaris. Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, agar buku inventaris dimaksud dapat digunakan sesuai fungsi dan perannya, maka pelaksanaannya harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi.

Inventarisasi digunakan untuk membuat sebuah daftar yang memuat semua aset atau barang yang dimiliki oleh organisasi, perusahaan, maupun instansi pemerintah baik itu yang berwujud ataupun tidak berwujud. Inventarisasi dilakukan

untuk mengetahui asal usul serta informasi yang berkaitan dengan aset. Informasi yang diperoleh dari hasil inventarisasi umumnya mencakup volume, luas, jenis, spesifikasi, merk dan harga perolehan dari aset. Inventarisasi juga memberikan informasi mengenai keberadaan aset pemerintah daerah, karena jumlah aset yang besar dapat memberikan kemungkinan aset yang tercatat hilang dan tidak diketahui keberadaannya ataupun aset yang jelas keberadaannya namun tidak tercatat di laporan aset milik pemerintah daerah. Untuk memudahkan pencatatan dan pemahaman disetiap instansi pemerintahan, maka dibuatlah ketentuan inventarisasi barang yang berlaku secara nasional di Indonesia, ketentuan tersebut digunakan untuk mengisi Kartu Inventaris Barang disetiap instansi milik pemerintah yang memiliki begitu banyak aset. Ketentuan berdasarkan Permendagri No.108 tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kodefikasi Barang Inventaris

Dengan inventarisasi yang baik dan terintegrasi maka akan mengurangi hilangnya aset ataupun barang karena kelalaian maupun kesengajaan akibat lemahnya teknis pencatatan dan pengawasan terhadap setiap aset yang dimiliki. Inventarisasi yang disertai dengan pencatatan seluruh aspek legal yang lengkap pun akan mencegah terjadinya sengketa ataupun perpindahan hak milik yang tidak

diinginkan oleh pemilik, maka hal tersebut yang membuat tidak bisa dilepaskannya pencatatan aspek-aspek legal suatu aset disaat melakukan kegiatan inventarisasi.

2.1.2.5. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 19 tahun 2016, “pelaporan barang milik daerah yang dilakukan Kuasa pengguna barang disampaikan setiap semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna”. Yang dimaksud dengan pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaporan adalah proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan.

Pelaporan terdiri sebagai berikut :

1. Kuasa pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna.
2. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
3. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masingmasing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

4. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.
5. Hasil sensus barang daerah dari masing-masing pengguna/kuasa pengguna, direkap ke dalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris tersebut menjadi buku induk inventaris.
6. Buku induk inventaris merupakan saldo awal pada daftar mutasi barang tahun berikutnya, selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya pengguna/kuasa pengguna dan pengelola hanya membuat Daftar Mutasi Barang
(bertambah dan/atau berkurang) dalam bentuk rekapitulasi barang milik daerah.
7. Mutasi barang bertambah dan atau berkurang pada masing-masing OPD setiap semester, dicatat secara tertib pada: Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang.
8. Laporan mutasi barang merupakan pencatatan barang bertambah dan/atau berkurang selama 6 (enam) bulan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui pengelola.
9. Laporan Mutasi Barang semester I dan semester II digabungkan menjadi Daftar Mutasi Barang selama 1 (satu) tahun, dan masing-masing dibuatkan Daftar Rekapitulasinya (Daftar Rekapitulasi Mutasi Barang).
10. Daftar mutasi barang selama 1 (satu) tahun tersebut disimpan di Pembantu Pengelola.
11. Rekapitulasi seluruh barang milik daerah (daftar mutasi) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

12. Laporan inventarisasi barang (mutasi bertambah dan/atau berkurang) selain mencantumkan jenis, merek, tipe, dan lain sebagainya juga harus mencantumkan nilai barang. Format Laporan Pengurus Barang :

- a. Buku Inventaris.
- b. Rekap Buku Inventaris.
- c. Laporan Mutasi Barang.
- d. Daftar Mutasi Barang.
- e. Rekapitulasi Daftar Mutasi Barang.
- f. Daftar Usulan Barang yang Akan Dihapus.
- g. Daftar Barang Milik Daerah yang Digunakannya.

2.1.2.6. Komitmen Pimpinan

Teori yang mendasari komitmen pimpinan adalah teori komitmen organisasi. Komitmen organisasi mulai diperkenalkan oleh Etzioni pada tahun 1961, istilah ini semakin populer sejak tahun 1977 setelah dibahas oleh Staw dan Salancik, yang mengajukan dua bentuk komitmen, yaitu komitmen sikap (*attitudinal commitment*) dan komitmen tingkah laku (*behavioral commitment*). Komitmen sikap adalah keadaan dimana individu mempertimbangkan sejauh mana nilai dan tujuan pribadinya sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi, serta sejauh mana keinginannya untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Komitmen tingkah laku didasarkan pada sejauh mana karyawan menetapkan keputusan untuk terikat pada organisasi berkaitan dengan adanya kerugian jika memutuskan melakukan alternatif lain di luar pekerjaannya saat ini. Komitmen dapat juga diartikan sebagai kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan

organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan pribadi. Komitmen dapat juga berarti penerimaan yang kuat individu terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi, dan individu berupaya serta berkarya dan memiliki hasrat yang kuat untuk tetap bertahan di organisasi tersebut. Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam organisasi atau kelompok tertentu (Adha, 2014). Mowday (1979) lebih lanjut menyatakan ketika karyawan mengidentifikasi tujuan tertentu organisasi dan dalam rangka mempertahankan keanggotaan dan memfasilitasi tujuan organisasi maka disaat itulah menunjukkan komitmen karyawan terhadap organisasi. Pengukuran komitmen seorang pimpinan yaitu Kepala OPD adalah tanggung jawab pada pendelegasian kewenangan pekerjaan dan mempercayakan tugas dan tanggung jawab ke bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan organisasinya.

Pimpinan yang tinggi, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut.

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Lutfi Pauzi Fahmi (2017)	Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran).	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi dan pelaporan	Hasil penelitian menunjukkan elemen pembukuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,874, elemen inventarisasi secara parsial tidak berpengaruh dan tidak signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 0,226, elemen pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai t hitung sebesar 1,779. Pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan nilai F hitung sebesar 13,745.
Novira Juwita Andiani, Dini	Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN	Variabel Dependen: Kualitas Laporan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan

<p>Wahyu Hapsari, Muhamad Muslih, (2017)</p>	<p>Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta)</p>	<p>Keuangan Variabel Independen: pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penerapan SIMAK BMN</p>	<p>berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Secara parsial ditemukan bahwa pembukuan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, inventarisasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, pelaporan tidak berpengaruh signifikan tetapi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan, dan SIMAK BMN tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
<p>Okta Dwi Kurnianto (2017)</p>	<p>Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Magelang)</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: Penatausahaan Barang Milik Daerah</p>	<p>Dengan menggunakan software SPSS 23 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

<p>Yulpi Poae, Ventje Ilat Jessy D.L., Warongan (2017) Vol. 8. No. 1</p>	<p>Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Perencanaan, Penilaian, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan BMD berpengaruh negatif dan tidak signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Pengujian secara simultan perencanaan, penilaian, penatausahaan, pengawasan dan pengendalian BMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.</p>
<p>Sukma Febrianti (2016) Vol. 10(1), 151-170</p>	<p>Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Pembukuan, Inventaris dan Pelaporan Aset Tetap</p>	<p>Pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pembukuan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel inventaris secara parsial berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel pelaporan parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>

<p>Ayang Putri Septiyu Anggraeni (2015)</p>	<p>Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo.</p>
<p>Anshari, Efrizal Syofyan (2012) ISSN: 2337-5345</p>	<p>Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang</p>	<p>Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen : Inventarisasi BMD, Legal audit, Penilaian BMD, Pengendalian dan pengawasan Barang.</p>	<p>Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Legal audit, Penilaian Barang Milik Daerah (BMD), Pengendalian dan pengawasan Barang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.</p>
<p>Oktaviana (2010)</p>	<p>Pengelolaan Aset Daerah Berkaitan Opini Disclaimer BPK Di Kabupaten</p>	<p>Variabel Dependen: Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>Perencanaan, penatausahaan, Peningkatan produktivitas, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian memiliki pengaruh</p>

	Tojo Una Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007	Variabel Independen : Perencanaan, Penatausahaan, Peningkatan Produktivitas, dan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian .	positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset daerah.
Simamora (2012)	faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel Independen : Sumber daya manusia, Pengetahuan pengelolaan aset, dan Penilaian aset. Variabel Pemoderasi : Komitmen pimpinan Variabel Dependen: Kualitas Laporan	Hasil penelitiannya menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran adalah sumber daya manusia, pengetahuan pengelolaan aset, penilaian aset, komitmen pimpinan dan sikap kurangnya kepedulian dan tanggung jawab pengelolaan aset setelah pemekaran wilayah tersebut, hal ini berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

<p>Tengku Erna Yusnita (2017)</p>	<p>Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Komitmen Pimpinan sebagai variabel moderating</p>	<p>Variabel independen : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan , kualitas sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi. Variabel Moderasi komitmen pimpinan dan Variabel Dependen kualitas laporan keuangan</p>	<p>penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, kualitas sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat. Komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan kualitas laporan keuangan. Komitmen pimpinan dapat memoderasi hubungan antara kualitas sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dengan kualitas laporan keuangan. Komitmen pimpinan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi dengan kualitas laporan keuangan.</p>
-----------------------------------	---	---	---

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1. Kerangka Koseptual

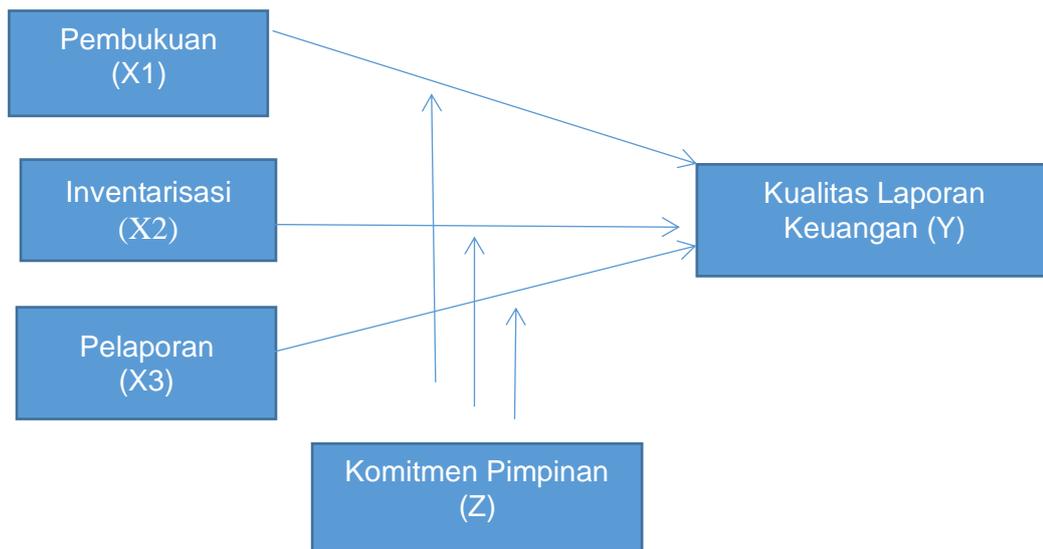
Stewardship theory (Donaldson dan Davis, 1991) menggambarkan situasi dimana para manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. *Stewardship theory* (Donaldson dan Davis, 1991) mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Dengan pembukuan yang baik, dan melakukan inventarisasi serta didukung oleh teknologi informasi dengan didorong oleh pelaporan yang baik maka kualitas laporan keuangan akan baik. Penentuan tujuan seseorang dipengaruhi oleh dengan kelengkapan sarana dan prasarana dalam pencapaian kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan teori tersebut, dirumuskan hubungan dimana Pembukuan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Inventarisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan serta Pembukuan, Inventarisasi dengan pelaporan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dimoderasi oleh Komitmen Pimpinan.

Menurut Permendagri No. 19 Tahun 2016, “penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada kegiatan pembukuan Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang dan dari kegiatan inventarisasi disusun Buku Inventaris yang memuat data yang

meliputi nomor, spesifikasi barang, bahan, asal/cara perolehan barang, ukuran barang/konstruksi, satuan, keadaan barang, jumlah barang dan harga, keterangan. Kemudian dilakukan proses pelaporan yaitu proses penyusunan laporan barang setiap semester dan setiap tahun setelah dilakukan inventarisasi dan pencatatan. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan, dan 5 (lima) tahunan kepada Kepala Daerah melalui pengelola. Sementara Pembantu Pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing-masing OPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yusuf (2015:27) menjelaskan bahwa “neraca daerah yang merupakan bagian dari komponen laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya, jika penatausahaan aset tetap antara fisik aset, dokumen pemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian”. Dengan adanya alur penatausahaan yang sistematis dan didukung oleh komitmen pimpinan yang tinggi, maka tingkat kepercayaan terhadap proses penatausahaan akan selalu dapat dipercaya siapapun yang membaca laporan keuangan tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut disusunlah kerangka pemikiran teoritis yang dapat ditunjukkan oleh model gambar sebagai berikut :



Kerangka Pemikiran

3.2. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak di uji kebenarannya dengan melihat hasil analisis peneliti adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.2.1 Pengaruh Pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, “karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Karakteristik kualitatif laporan keuangan terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Yusuf (2015:27) menjelaskan bahwa “neraca daerah yang merupakan bagian dari komponen laporan keuangan akan lengkap dan dapat dipercaya, jika penatausahaan aset tetap antara fisik aset, dokumen pemilikan, dan penatausahaan dalam buku inventaris mempunyai kesesuaian”.

Hasil penelitian Fahmi (2017), elemen pembukuan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasilnya juga menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap di Kabupaten Pangandaran yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara penelitian yang dilakukan Febrianti (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan aset tetap pada pemerintah kabupaten Kubu Raya yang terdiri atas 3 komponen yaitu pembukuan, inventarisasi dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Terdapat pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja.

3.2.2. Pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan

Penelitian yang dilakukan oleh Febrianti (2016) mengenai Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu penelitian yang dilakukan Anggraeni (2015) dengan judul Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo dimana hasil penelitian menemukan secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian maka hipotesis dalam penelitian ini:

H2: Terdapat pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja.

3.2.3. Pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2015) dimana judul penelitian Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo dimana menemukan bahwa secara simultan dan parsial, variabel pembukuan, inventarisasi dan pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan Penelitian Febrianti (2016) mengenai Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya menemukan bahwa pembukuan, inventaris dan pelaporan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novira dkk (2017) mengenai Pengaruh Penatausahaan dan Penerapan SIMAK BMN Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta) dimana menunjukkan bahwa pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan penerapan SIMAK BMN secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini:

H3: Terdapat pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja

3.2.4. Pengaruh Komitmen Pimpinan sebagai Pemoderasi Pengaruh Penatausahaan BMD yang terdiri dari Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Komitmen pimpinan mengandung unsur konsistensi dalam melaksanakan proses keuangan dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam hal pengelolaan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Agar dapat dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka para pemangku kepentingan perlu meningkatkan komitmen dari tingkat pucuk pimpinan sampai tingkat bawah untuk *mendukung* terhadap pengelolaan BMD khususnya penatausahaan di masing-masing satuan kerjanya.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berhasil tidaknya pengaruh variabel penatausahaan BMD juga dipengaruhi pula oleh komitmen organisasi termasuk komitmen pimpinan (Suryanto, 2017).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pembukuan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja.

H5: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh inventarisasi terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja.

H6: Komitmen pimpinan memoderasi pengaruh pelaporan terhadap kualitas laporan keuangan Kabupaten Tana Toraja.